



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KLATEN**

NOMOR 5 TAHUN 2010

T E N T A N G

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 435);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

1. Surplus / defisit setelah Perubahan	Rp. 1.031.249.426.000,00
2. Realisasi	Rp. 86.121.577.296,00
Salah (kurang)	Rp. (56.127.742.704,00)
d. Salah anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 56.127.742.704,00 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Surplus / defisit setelah Perubahan	Rp. (62.121.363.000,00)
2. Realisasi	Rp. 3.412.587.706,00
Salah lebih	Rp. 65.534.122.706,00

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
dan
BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 984.534.437.004,00	
b. Belanja	<u>Rp. 981.121.677.296,00</u>	
Surplus		Rp. 3.412.759.708,00
c. Pembiayaan :		
- Penerimaan	Rp. 57.594.345.860,00	
- Pengeluaran	<u>Rp. 497.479.000,00</u>	
Pembiayaan Neto		<u>Rp. 57.096.866.860,00</u>

Pasal 3

Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 11.406.374.004,00 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp. 973.128.063.000,00
 2. Realisasi Rp. 984.534.437.004,00
 - Selisih lebih Rp. 11.406.374.004,00
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (54.127.748.704,00) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran belanja setelah Perubahan Rp. 1.035.249.426.000,00
 2. Realisasi Rp. 981.121.677.296,00
 - Selisih (kurang) Rp. (54.127.748.704,00)
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 65.534.122.708,00 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Surplus / defisit setelah Perubahan Rp. (62.121.363.000,00)
 2. Realisasi Rp. 3.412.759.708,00
 - Selisih lebih Rp. 65.534.122.708,00

- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (5.027.017.140,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. 62.621.363.000,00 |
| 2. Realisasi | Rp. 57.594.345.860,00 |
| Selisih (kurang) | Rp. (5.027.017.140,00) |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. (2.521.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|--------------------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. 500.000.000,00 |
| 2. Realisasi | Rp. 497.479.000,00 |
| Selisih (kurang) | Rp. (2.521.000,00) |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. (5.024.496.140,00) dengan rincian sebagai Berikut :
- | | |
|---|------------------------|
| 1. Anggaran Pembiayaan Neto setelah perubahan | Rp. 62.121.363.000,00 |
| 2. Realisasi | Rp. 57.096.866.860,00 |
| Selisih (kurang) | Rp. (5.024.496.140,00) |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2009 sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp. 5.433.972.951.964,77
b. Jumlah Utang	Rp. 27.166.908.969,00
c. Jumlah Ekuitas dana	Rp. 5.406.806.042.995,77

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2009 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2009	Rp. 37.485.045.503,00
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 71.655.054.049,00
c. Arus kas dari investasi non keuangan	Rp. (68.242.294.341,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. 19.370.797.357,00
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. 6.762.391.101,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2009	Rp. 67.135.307.921,00

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2009 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009.
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi ;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi.pendapatan, belanja dan pembiayaan ;

- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan ;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah ;
- Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah ;
- Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah ;
- Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah ;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya ;
- Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya ;
- Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah ; dan
- Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca.
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas.
- d. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Penjabaran tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di K l a t e n
pada tanggal 3 September 2010

BUPATI KLATEN,

SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 3 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

INDARWANTO

- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan ;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah ;
- Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah ;
- Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah ;
- Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah ;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya ;
- Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya ;
- Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah ; dan
- Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca.
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas.
- d. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Penjabaran tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di K l a t e n
pada tanggal 3 September 2010

BUPATI KLATEN,

SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 3 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

INDARWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2010 NOMOR 4

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 TAHUN ANGGARAN 2009

AUDITED

URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	(%)
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
PENDAPATAN	973.128.063.000,00	984.534.437.004,00	11.406.374.004,00	101,17	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	66.073.046.000,00	46.603.876.930,00	(19.469.169.070,00)	70,53	
Pendapatan Pajak Daerah	20.464.500.000,00	18.921.063.434,00	(1.543.436.566,00)	92,46	
Pendapatan Retribusi Daerah	12.400.488.000,00	11.034.755.597,00	(1.365.732.403,00)	88,99	
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.481.000.000,00	4.101.047.114,00	(1.379.952.886,00)	74,82	
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	27.727.058.000,00	12.547.010.785,00	(15.180.047.215,00)	45,25	
PENDAPATAN TRANSFER	892.253.658.000,00	922.915.374.294,00	30.661.716.294,00	103,44	
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	844.921.919.000,00	841.073.104.734,00	(3.848.814.266,00)	99,54	
Dana Bagi Hasil Pajak	40.540.842.000,00	38.281.761.514,00	(2.259.080.486,00)	94,43	
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	6.193.815.000,00	4.604.081.220,00	(1.589.733.780,00)	74,33	
Dana Alokasi Umum	726.192.262.000,00	726.192.262.000,00	0,00	100,00	
Dana Alokasi Khusus	71.995.000.000,00	71.995.000.000,00	0,00	100,00	
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	6.950.742.000,00	36.252.417.000,00	29.301.675.000,00	521,56	
Dana Penyesuaian	6.950.742.000,00	36.252.417.000,00	29.301.675.000,00	521,56	
Transfer Pemerintah Provinsi	40.380.997.000,00	45.589.852.560,00	5.208.855.560,00	112,90	
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	40.380.997.000,00	45.589.852.560,00	5.208.855.560,00	112,90	
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	14.801.359.000,00	15.015.185.780,00	213.826.780,00	101,44	
Pendapatan Lainnya	14.801.359.000,00	15.015.185.780,00	213.826.780,00	101,44	
BELANJA	1.035.249.426.000,00	981.121.677.296,00	(54.127.748.704,00)	94,77	
BELANJA OPERASI	958.531.475.000,00	911.620.049.731,00	(46.911.425.269,00)	95,11	
Belanja Pegawai	727.981.150.000,00	693.011.043.538,00	(34.970.106.462,00)	95,20	
Belanja Barang	94.704.076.000,00	84.987.000.545,00	(9.717.075.455,00)	89,74	
Belanja Hibah	47.271.680.000,00	47.256.680.000,00	(15.000.000,00)	99,97	
Belanja Bantuan Sosial	38.978.345.000,00	38.198.674.348,00	(779.670.652,00)	98,00	
Belanja Bantuan Keuangan	49.596.224.000,00	48.166.651.300,00	(1.429.572.700,00)	97,12	
BELANJA MODAL	75.194.885.000,00	68.465.698.155,00	(6.729.186.845,00)	91,05	

MOR KUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2	Belanja Peralatan dan Mesin	13.145.356.000,00	12.682.026.855,00	(463.329.145,00)	96,48
3	Belanja Bangunan dan Gedung	25.013.364.000,00	23.027.727.300,00	(1.985.636.700,00)	92,06
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	35.217.259.000,00	30.970.596.300,00	(4.246.662.700,00)	87,94
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.723.406.000,00	1.690.397.700,00	(33.008.300,00)	98,08
6	Belanja Aset Lainnya	95.500.000,00	94.950.000,00	(550.000,00)	99,42
1	BELANJA TAK TERDUGA	1.126.114.000,00	726.801.800,00	(399.312.200,00)	64,54
1	Belanja Tak Terduga	1.126.114.000,00	726.801.800,00	(399.312.200,00)	64,54
1	TRANSFER	396.952.000,00	309.127.610,00	(87.824.390,00)	77,88
1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	396.952.000,00	309.127.610,00	(87.824.390,00)	77,88
1.2	Bagi Hasil Retribusi	396.952.000,00	309.127.610,00	(87.824.390,00)	77,88
	SURPLUS / (DEFISIT)	(62.121.363.000,00)	3.412.759.708,00	65.534.122.708,00	(5,49)
	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN DAERAH				
1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	62.621.363.000,00	57.594.345.860,00	(5.027.017.140,00)	91,97
2	Pencairan Dana Cadangan	37.726.069.000,00	37.726.069.503,00	503,00	100,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	22.450.000.000,00	17.464.964.500,00	(4.985.035.500,00)	77,79
5	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	147.560.000,00	147.560.000,00	0,00
6	Penerimaan Piutang Daerah	2.445.294.000,00	1.255.751.857,00	(1.189.542.143,00)	51,35
	PENGELUARAN DAERAH				
1	Pembentukan Dana Cadangan	500.000.000,00	497.479.000,00	(2.521.000,00)	99,50
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	500.000.000,00	497.479.000,00	(2.521.000,00)	99,50
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	62.121.363.000,00	57.096.866.860,00	(5.024.496.140,00)	91,91
		0,00	60.509.626.568,00	60.509.626.568,00	0,00

Klaten, 3 September 2010

BUPATI

SUNARNA

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	13.145.356.000,00	12.682.026.855,00	(463.329.145,00)	96,48
2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	25.013.364.000,00	23.027.727.300,00	(1.985.636.700,00)	92,06
2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	35.217.259.000,00	30.970.596.300,00	(4.246.662.700,00)	87,94
2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.723.406.000,00	1.690.397.700,00	(33.008.300,00)	98,08
2.6	Belanja Aset Lainnya	95.500.000,00	94.950.000,00	(550.000,00)	99,42
3	BELANJA TAK TERDUGA	1.126.114.000,00	726.801.800,00	(399.312.200,00)	64,54
3.1	Belanja Tak Terduga	1.126.114.000,00	726.801.800,00	(399.312.200,00)	64,54
4	TRANSFER	396.952.000,00	309.127.610,00	(87.824.390,00)	77,88
4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	396.952.000,00	309.127.610,00	(87.824.390,00)	77,88
4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	396.952.000,00	309.127.610,00	(87.824.390,00)	77,88
	SURPLUS / (DEFISIT)	(62.121.363.000,00)	3.412.759.708,00	65.534.122.708,00	(5,49)
	PEMBIAYAAN				
1	PENERIMAAN DAERAH	62.621.363.000,00	57.594.345.860,00	(5.027.017.140,00)	91,97
1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	37.726.069.000,00	37.726.069.503,00	503,00	100,00
1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	22.450.000.000,00	17.464.964.500,00	(4.985.035.500,00)	77,79
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	147.560.000,00	147.560.000,00	0,00
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	2.445.294.000,00	1.255.751.857,00	(1.189.542.143,00)	51,35
2	PENGELUARAN DAERAH	500.000.000,00	497.479.000,00	(2.521.000,00)	99,50
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Pembayaran Pokok Utang	500.000.000,00	497.479.000,00	(2.521.000,00)	99,50
	PEMBIAYAAN NETTO	62.121.363.000,00	57.096.866.860,00	(5.024.496.140,00)	91,91
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	60.509.626.568,00	60.509.626.568,00	0,00

Klaten, 3 September 2010

BUPATI

SUNARNA

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN **RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI** TAHUN ANGGARAN 2009

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	PENDAPATAN				
	Urusan Wajib				
01	Pendidikan	973.128.063.000,00	584.534.437.004,00	11.406.374.004,00	101,17
01.1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	972.632.584.000,00	984.330.096.254,00	11.697.512.254,00	101,20
02	Kesehatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
02.1.02.01	DINAS KESEHATAN	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
03	Pekerjaan Umum	4.799.900.000,00	4.447.103.520,00	(352.796.480,00)	92,65
03.1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM	4.799.900.000,00	4.447.103.520,00	(352.796.480,00)	92,65
07	Perhubungan	1.195.265.000,00	1.002.914.441,00	(192.350.559,00)	83,91
07.1.07.01	DINAS PERHUBUNGAN	1.195.265.000,00	1.002.914.441,00	(192.350.559,00)	83,91
10	Kependudukan dan Catatan Sipil	585.477.000,00	583.487.700,00	(1.989.300,00)	99,66
10.1.10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	585.477.000,00	583.487.700,00	(1.989.300,00)	99,66
15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	63.845.000,00	90.317.500,00	26.472.500,00	141,46
15.1.15.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOOPERASI DAN UMMKM	63.845.000,00	90.317.500,00	26.472.500,00	141,46
17	Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan OR	3.490.000.000,00	3.039.744.275,00	(450.255.725,00)	87,10
17.1.17.01	DINAS KEBUDAYAAN, PARAWISATA, PEMUDA DAN OLARAGA	3.490.000.000,00	3.039.744.275,00	(450.255.725,00)	87,10
20	Oto Daerah, Pem Umum, Adm Keku, Pertanahan, Kepeg, PenModal, ESDM, Kom & Inf	592.910.000,00	393.565.000,00	(199.345.000,00)	66,38
20.1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH	592.910.000,00	393.565.000,00	(199.345.000,00)	66,38
20.1.20.05	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	961.903.187.000,00	974.770.963.818,00	12.867.776.818,00	101,34
2.01	Urusan Pilihan	6.119.100.000,00	4.947.451.533,00	(1.171.648.467,00)	80,85
2.01.2.01.01	Pertanian	955.784.087.000,00	969.823.512.285,00	14.039.425.285,00	101,47
	DINAS PERTANIAN	495.479.000,00	204.340.750,00	(291.138.250,00)	41,24
		495.479.000,00	204.340.750,00	(291.138.250,00)	41,24
		495.479.000,00	204.340.750,00	(291.138.250,00)	41,24

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
PENERIMAAN DAERAH Urusan Wajib Oto Daerah, Pem Umum, Adm Keu, Pertanahan, Kepeg, PenModal, ESDM, Kom & Inf DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Pencatiran Dana Cadangan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembentukan Dana Cadangan Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang	20. 1.20.05. 1 62.621.363.000,00	57.594.345.860,00	(5.027.017.140,00)	91,97
	20. 1.20.05. 1.1 37.726.069.000,00	37.726.069.503,00	503,00	100,00
	20. 1.20.05. 1.2 0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
	20. 1.20.05. 1.4 22.450.000.000,00	17.464.964.500,00	(4.985.035.500,00)	77,79
	20. 1.20.05. 1.5 0,00	147.560.000,00	147.560.000,00	0,00
	20. 1.20.05. 1.6 2.445.234.000,00	1.255.751.857,00	(1.189.542.143,00)	51,35
	20. 1.20.05. 2 500.000.000,00	497.479.000,00	(2.521.000,00)	99,50
	20. 1.20.05. 2.1 0,00	0,00	0,00	0,00
	20. 1.20.05. 2.2 0,00	0,00	0,00	0,00
	20. 1.20.05. 2.3 500.000.000,00	497.479.000,00	(2.521.000,00)	99,50

Klaten, 3 September 2010

BUPATI

SUNARNA

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
PEMBIAYAAN DAERAH Urusan Wajib Oto Daerah, Pem Umum, Adm Keu, Pertanahan, Kepeg, PenModal, ESDM, Kom & Inf DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang					
	20. 1,20.05. 1	62.621.363.000,00	57.594.345.860,00	(5.027.017.140,00)	91,97
	20. 1,20.05. 1. 1	37.726.069.000,00	37.726.069.503,00	503,00	100,00
	20. 1,20.05. 1. 2	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
	20. 1,20.05. 1. 4	22.450.000.000,00	17.464.964.500,00	(4.985.035.500,00)	77,79
	20. 1,20.05. 1. 5	0,00	147.560.000,00	147.560.000,00	0,00
	20. 1,20.05. 1. 6	2.445.294.000,00	1.255.751.857,00	(1.189.542.143,00)	51,35
	20. 1,20.05. 2	500.000.000,00	497.479.000,00	(2.521.000,00)	99,50
	20. 1,20.05. 2. 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	20. 1,20.05. 2. 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	20. 1,20.05. 2. 3	500.000.000,00	497.479.000,00	(2.521.000,00)	99,50

Klaten, 3 September 2010

BUPATI

SUNARNA

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2009

Pemerintahan : 1
Pemerintahan : 1.01
Organisasi : 1.01.01
Unit Organisasi : 1.01.01.01
Urusan Wajib Pendidikan
DINAS PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.01.01.00.00.5	BELANJA	93.035.343.000,00	88.830.262.816,00	(4.205.080.184,00)	95,48	
01.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	78.092.908.000,00	75.030.439.448,00	(3.062.468.552,00)	96,08	
01.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	78.092.908.000,00	75.030.439.448,00	(3.062.468.552,00)	96,08	
01.01.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	14.942.435.000,00	13.799.823.368,00	(1.142.611.632,00)	92,35	
01.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	750.535.000,00	628.001.688,00	(122.533.312,00)	83,67	
01.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
01.01.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
01.01.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	95.000.000,00	65.410.043,00	(29.589.957,00)	68,85	
01.01.01.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	65.410.043,00	(29.589.957,00)	68,85	
01.01.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	105.000.000,00	94.889.274,00	(10.110.726,00)	90,37	
01.01.01.01.01.07.5.2.1	Belanja Pegawai	100.501.000,00	90.390.274,00	(10.110.726,00)	89,94	
01.01.01.01.01.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.499.000,00	4.499.000,00	0,00	100,00	
01.01.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	25.000.000,00	24.998.259,00	(1.741,00)	99,99	
01.01.01.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.998.259,00	(1.741,00)	99,99	
01.01.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	78.155.000,00	78.154.112,00	(888,00)	100,00	
01.01.01.01.01.10.5.2.1	Belanja Pegawai	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	100,00	
01.01.01.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	76.005.000,00	76.004.112,00	(888,00)	100,00	
01.01.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaian	75.000.000,00	69.800.000,00	(5.200.000,00)	93,07	
01.01.01.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	69.800.000,00	(5.200.000,00)	93,07	
01.01.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	

KODE AKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp) 5 = 4 - 3	(%) 6	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.01.01.21.07.5.2.1	Belanja Pegawai	422.000,00	375.000,00	(47.000,00)	88,86	
01.01.01.21.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.578.000,00	29.357.000,00	(221.000,00)	99,25	
01.01.01.22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	70.000.000,00	69.760.000,00	(240.000,00)	99,66	
01.01.01.22.02	Pembibitan dan perawatan ternak	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
01.01.01.22.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.465.000,00	15.465.000,00	0,00	100,00	
01.01.01.22.02.5.2.3	Belanja Modal	4.535.000,00	4.535.000,00	0,00	100,00	
01.01.01.22.11	Pengembangan Sentra Ternak Sapi di Kab. Klaten	50.000.000,00	49.760.000,00	(240.000,00)	99,52	
01.01.01.22.11.5.2.1	Belanja Pegawai	286.000,00	286.000,00	0,00	100,00	
01.01.01.22.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.714.000,00	49.474.000,00	(240.000,00)	99,52	
01.01.01.25	Program Pengembangan Cluster dan revitalisasi bidang pertanian	85.000.000,00	68.393.800,00	(16.606.200,00)	80,46	
01.01.01.25.02	Fasilitasi RPK	50.000.000,00	33.474.800,00	(16.525.200,00)	66,95	
01.01.01.25.02.5.2.1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
01.01.01.25.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.600.000,00	28.074.800,00	(16.525.200,00)	62,95	
01.01.01.25.03	Demplot Revitalisasi Tanah Pertanian	35.000.000,00	34.915.000,00	(81.000,00)	99,77	
01.01.01.25.03.5.2.1	Belanja Pegawai	3.426.000,00	3.426.000,00	0,00	100,00	
01.01.01.25.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.574.000,00	31.493.000,00	(81.000,00)	99,74	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(19.910.066.000,00)	(18.909.167.170,00)	1.000.898.830,00	94,97	

Klaten, 3 September 2010

BUPATI

SUNARNA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.01.01.01.21.07.5.2.1	Belanja Pegawai	422.000,00	375.000,00	(47.000,00)	88,86	
2.01.01.01.21.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.578.000,00	29.357.000,00	(221.000,00)	99,25	
2.01.01.01.22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	70.000.000,00	69.760.000,00	(240.000,00)	99,66	
2.01.01.01.22.02	<i>Pembelian dan perawatan ternak</i>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
2.01.01.01.22.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.465.000,00	15.465.000,00	0,00	100,00	
2.01.01.01.22.02.5.2.3	Belanja Modal	4.535.000,00	4.535.000,00	0,00	100,00	
2.01.01.01.22.11	<i>Pengembangan Sentra Ternak Sapi di Kab. Klaten</i>	50.000.000,00	49.760.000,00	(240.000,00)	99,52	
2.01.01.01.22.11.5.2.1	Belanja Pegawai	286.000,00	286.000,00	0,00	100,00	
2.01.01.01.22.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49.714.000,00	49.474.000,00	(240.000,00)	99,52	
2.01.01.01.25	Program Pengembangan Cluster dan revitalisasi bidang pertanian	85.000.000,00	68.393.800,00	(16.606.200,00)	80,46	
2.01.01.01.25.02	<i>Pendampingan RPPK</i>	50.000.000,00	33.474.800,00	(16.525.200,00)	66,95	
2.01.01.01.25.02.5.2.1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
2.01.01.01.25.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.600.000,00	28.074.800,00	(16.525.200,00)	62,95	
2.01.01.01.25.03	<i>Demplo Revitalisasi Tanah Pertanian</i>	35.000.000,00	34.919.000,00	(81.000,00)	99,77	
2.01.01.01.25.03.5.2.1	Belanja Pegawai	3.426.000,00	3.426.000,00	0,00	100,00	
2.01.01.01.25.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.574.000,00	31.493.000,00	(81.000,00)	99,74	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(19.910.066.000,00)	(18.909.167.170,00)	1.000.898.830,00	94,97	

Klaten, 3 September 2010

BUPATI

SUNARNA



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2009

Urusan Pemerintahan : 1.01
Unit Organisasi : 1.01.01
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01
Urusan Wajib Pendidikan
DINAS PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN					BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		REALISASI					(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA			JUMLAH			
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
01	Urusan Wajib	1.364.724.000,00	4.673.841.000,00	8.903.870.000,00	14.942.435.000,00	(1.142.611.632,00)	92,35	
	Pendidikan	1.322.458.274,00	3.880.058.464,00	8.597.306.630,00	13.799.823.368,00	(1.139.911.632,00)	92,32	
		1.364.054.000,00	4.669.511.000,00	8.808.870.000,00	14.842.435.000,00	(1.139.911.632,00)	92,32	
		1.321.788.274,00	3.876.428.464,00	8.504.306.630,00	13.702.523.368,00	(1.139.911.632,00)	92,32	
		1.364.054.000,00	4.669.511.000,00	8.808.870.000,00	14.842.435.000,00	(1.139.911.632,00)	92,32	
	DINAS PENDIDIKAN	1.321.788.274,00	3.876.428.464,00	8.504.306.630,00	13.702.523.368,00	(1.139.911.632,00)	92,32	
	Dinas Pendidikan	1.364.054.000,00	4.669.511.000,00	8.808.870.000,00	14.842.435.000,00	(1.139.911.632,00)	92,32	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.321.788.274,00	3.876.428.464,00	8.504.306.630,00	13.702.523.368,00	(1.139.911.632,00)	92,32	
		113.451.000,00	637.084.000,00	0,00	750.535.000,00	(122.533.312,00)	83,67	
		103.340.274,00	524.661.414,00	0,00	628.001.688,00	0,00	100,00	
0,00		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	(29.589.957,00)	68,85		
01.1.01.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	95.000.000,00	0,00	95.000.000,00	(10.110.726,00)	90,37	
01.1.01.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	100.501.000,00	4.499.000,00	0,00	105.000.000,00	(1.741,00)	99,99	
01.1.01.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	90.390.274,00	4.499.000,00	0,00	94.889.274,00	(888,00)	100,00	
01.1.01.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	2.150.000,00	76.005.000,00	0,00	78.155.000,00			
		2.150.000,00	76.004.112,00	0,00	78.154.112,00			

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URAIAN 1.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 1

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI					BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	Jumlah 6 = 3 + 4 + 5	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
2.01.01	DINAS PERTANIAN	2.975.000,00	38.625.000,00	1.687.400.000,00	1.729.000.000,00	(70.955.050,00)	95,90	
		2.975.000,00	38.524.950,00	1.616.545.000,00	1.658.044.950,00			
2.01.01 . 01	Dinas Pertanian	2.975.000,00	38.625.000,00	1.687.400.000,00	1.729.000.000,00	(70.955.050,00)	95,90	
		2.975.000,00	38.524.950,00	1.616.545.000,00	1.658.044.950,00			
2.01.01 . 01 . 20	Program pengembangan budidaya perikanan	2.975.000,00	38.625.000,00	1.687.400.000,00	1.729.000.000,00	(70.955.050,00)	95,90	
		2.975.000,00	38.524.950,00	1.616.545.000,00	1.658.044.950,00			
2.01.01 . 01 . 20 . 05	DAK Bidang Perikanan	0,00	0,00	1.534.000.000,00	1.534.000.000,00	(64.785.273,00)	95,78	
		0,00	0,00	1.469.214.727,00	1.469.214.727,00			
2.01.01 . 01 . 20 . 06	Pendampingan DAK Perikanan	2.975.000,00	38.625.000,00	153.400.000,00	195.000.000,00	(6.169.777,00)	96,84	
		2.975.000,00	38.524.950,00	147.330.273,00	188.830.223,00			
Jumlah		298.517.000,00	2.093.860.000,00	4.904.283.000,00	7.296.660.000,00	(825.505.966,00)	88,69	
		271.093.000,00	1.969.771.034,00	4.230.290.000,00	6.471.154.034,00			

Klaten, 3 September 2010
BUPATI

SUNARNA

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI					BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		PEGAJAI	JENIS BELANJA		Jumlah	(Rp)	(%)	
			BARANG & JASA	MODAL				
								3
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
2.05 . 2.01.01	DINAS PERTANIAN	2.975.000,00	38.625.000,00	1.687.400.000,00	1.729.000.000,00	(70.955.050,00)	95	
		2.975.000,00	38.524.950,00	1.616.545.000,00	1.658.044.950,00			
		2.975.000,00	38.625.000,00	1.687.400.000,00	1.729.000.000,00	(70.955.050,00)	95	
2.05 . 2.01.01 . 01	Dinas Pertanian	2.975.000,00	38.524.950,00	1.616.545.000,00	1.658.044.950,00			
2.05 . 2.01.01 . 01 . 20	Program pengembangan budidaya perikanan	2.975.000,00	38.625.000,00	1.687.400.000,00	1.729.000.000,00	(70.955.050,00)	95	
		2.975.000,00	38.524.950,00	1.616.545.000,00	1.658.044.950,00			
		0,00	0,00	1.534.000.000,00	1.534.000.000,00	(64.785.273,00)	95	
2.05 . 2.01.01 . 01 . 20 . 05	DAK Bidang Perikanan	0,00	0,00	1.469.214.727,00	1.469.214.727,00			
2.05 . 2.01.01 . 01 . 20 . 06	Pendampingan DAK Perikanan	2.975.000,00	38.625.000,00	153.400.000,00	195.000.000,00	(6.169.777,00)	96	
		2.975.000,00	38.524.950,00	147.330.273,00	188.830.223,00			
		JUMLAH	298.517.000,00	2.093.860.000,00	4.904.283.000,00	7.296.660.000,00	(825.505.966,00)	88
		271.093.000,00	1.969.771.034,00	4.230.290.000,00	6.471.154.034,00			

Klaten, 3 September 2010

BUPATI

SUNARNA

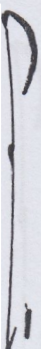
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

TAHUN ANGGARAN

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)			
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
06	PELAYANAN UMUM	252.103.823.000,00	238.631.126.013,00	(13.472.696.987,00)	94,66
1	Perencanaan Pembangunan	3.348.081.000,00	2.994.641.816,00	(353.439.184,00)	89,44
20	Oto Daerah, Pem Umum, Adm Keu, Pertanahan, Kopeg, PemModal, ESDM, Kom & Inf	246.013.859.000,00	233.254.341.940,00	(12.759.517.060,00)	94,81
1	Ketahanan Pangan	740.218.000,00	483.848.672,00	(256.369.328,00)	65,37
23	Statistik	215.000.000,00	214.690.100,00	(309.900,00)	99,86
1	Kearsipan dan Perpustakaan	1.423.590.000,00	1.337.974.485,00	(85.615.515,00)	93,99
24	Komunikasi dan Informatika	363.075.000,00	345.629.000,00	(17.446.000,00)	95,19
1					
19	KETERITBAN DAN KEAMANAN	5.655.460.000,00	5.645.842.341,00	(9.617.659,00)	99,83
1	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	5.655.460.000,00	5.645.842.341,00	(9.617.659,00)	99,83
1					
07	EKONOMI	43.611.490.000,00	41.467.654.339,00	(2.143.835.661,00)	95,08
1	Perhubungan	3.572.227.000,00	4.019.314.600,00	447.087.600,00	112,52
14	Tenaga Kerja	668.290.000,00	602.884.959,00	(65.405.041,00)	90,21
1	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	12.669.976.000,00	11.994.195.214,00	(675.780.786,00)	94,67
15	Penanaman Modal	302.450.000,00	246.917.632,00	(55.532.368,00)	81,64
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.692.758.000,00	3.551.768.714,00	(140.989.286,00)	96,18
22	Pertanian	18.692.706.000,00	17.442.802.970,00	(1.249.903.030,00)	93,31
2	Kehutanan	150.000.000,00	147.651.000,00	(2.349.000,00)	98,43
2	Energi dan Sumberdaya Mineral	35.700.000,00	26.985.000,00	(8.715.000,00)	75,59
03	Kelautan dan Perikanan	1.729.000.000,00	1.658.044.950,00	(70.955.050,00)	95,90
05	Pedagangan	1.912.810.000,00	1.600.235.900,00	(312.574.100,00)	83,66
06	Perindustrian	71.173.000,00	66.988.400,00	(4.184.600,00)	94,12
07	Transmigrasi	114.400.000,00	109.865.000,00	(4.535.000,00)	96,04
2					
08	LINGKUNGAN HIDUP	12.422.222.000,00	11.967.547.095,00	(454.674.905,00)	96,34
1	Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan dan Statistik	6.916.401.000,00	6.622.149.104,00	(294.251.896,00)	95,75
1	Lingkungan Hidup	5.505.821.000,00	5.345.397.991,00	(160.423.009,00)	97,09
1					
08	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	71.610.049.000,00	62.730.144.321,00	(8.879.904.679,00)	87,60

URAIAN	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2	3	4	5	6
03 Pekerjaan Umum	71.410.049.000,00	62.542.403.321,00	(8.867.645.679,00)	87,58
04 Perumahan	200.000.000,00	187.741.000,00	(12.259.000,00)	93,87
KESEHATAN				
02 Kesehatan	74.108.078.000,00	70.830.770.074,00	(3.277.307.926,00)	95,58
12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	73.606.052.000,00	70.338.891.624,00	(3.267.160.376,00)	95,56
	502.026.000,00	491.878.450,00	(10.147.550,00)	97,98
PARIWISATA DAN BUDAYA				
17 Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan OR	11.478.628.000,00	11.220.929.748,00	(257.698.252,00)	97,75
04 Pariwisata	2.427.428.000,00	2.522.263.748,00	94.835.748,00	103,91
	9.051.200.000,00	8.698.666.000,00	(352.534.000,00)	96,11
PENDIDIKAN				
01 Pendidikan	553.413.586.000,00	528.750.054.917,00	(24.663.531.083,00)	95,54
18 Pemuda dan Olah Raga	552.719.360.000,00	528.070.652.317,00	(24.648.707.683,00)	95,54
26 Perpustakaan	422.900.000,00	414.016.000,00	(8.884.000,00)	97,90
	271.326.000,00	265.386.600,00	(5.939.400,00)	97,81
PERLINDUNGAN SOSIAL				
10 Kependudukan dan Catatan Sipil	10.846.090.000,00	9.877.608.448,00	(968.481.552,00)	91,07
11 Pemberdayaan Perempuan, Perlind. Anak, Kel. Berencana dan Kel. Sejahtera	3.521.992.000,00	3.186.829.601,00	(335.162.399,00)	90,48
13 Sosial	2.580.615.000,00	2.521.859.957,00	(58.755.043,00)	97,72
	4.743.483.000,00	4.168.918.890,00	(574.564.110,00)	87,89
JUMLAH	1.035.249.426.000,00	981.121.677.296,00	(54.127.748.704,00)	94,77

Klaten, 3 September 2010
BUPATI



URAIAN		Jumlah (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	03	71.410.049.000,00	62.542.403.321,00	(8.867.645.679,00)	87,58
1	04	200.000.000,00	187.741.000,00	(12.259.000,00)	93,87
	KESEHATAN				
1	02	74.108.078.000,00	70.830.770.074,00	(3.277.307.926,00)	95,58
1	12	73.606.052.000,00	70.338.891.624,00	(3.267.160.376,00)	95,56
	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	502.026.000,00	491.878.450,00	(10.147.550,00)	97,98
	PARIWISATA DAN BUDAYA				
1	17	11.478.628.000,00	11.220.929.748,00	(257.698.252,00)	97,75
2	04	2.427.428.000,00	2.522.263.748,00	94.835.748,00	103,91
	Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan OR	9.051.200.000,00	8.698.666.000,00	(352.534.000,00)	96,11
	Parwisata				
1	01	553.413.586.000,00	528.750.054.917,00	(24.663.531.083,00)	95,54
1	18	552.719.360.000,00	528.070.652.317,00	(24.648.707.683,00)	95,54
1	26	422.900.000,00	414.016.000,00	(8.884.000,00)	97,90
	Pendidikan	271.326.000,00	265.386.600,00	(5.939.400,00)	97,81
	Pemuda dan Olah Raga				
	Perpustakaan				
	PENDIDIKAN				
	PERLINDUNGAN SOSIAL				
1	10	10.846.090.000,00	9.877.608.448,00	(968.481.552,00)	91,07
1	11	3.521.992.000,00	3.186.829.601,00	(335.162.399,00)	90,48
1	13	2.580.615.000,00	2.521.859.957,00	(58.755.043,00)	97,72
	Kependudukan dan Catatan Sipil	4.743.483.000,00	4.168.918.890,00	(574.564.110,00)	87,89
	Pemberdayaan Perempuan, Perlind. Anak, Kel. Berencana dan Kel. Sejahtera				
	Sosial				
	JUMLAH	1.035.249.426.000,00	981.121.677.296,00	(54.127.748.704,00)	94,77

Klaten, 3 September 2010

BUPATI

SUNARNA

KABUPATEN KLATEN
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

Lampiran I.5 : Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
 Nomor : 5 Tahun 2010
 Tanggal : 3 September 2010

NO.	URAIAN RINCIAN PIUTANG	TAHUN PENGAKUAN PIUTANG	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN TAHUN 2009	PENGURANGAN TAHUN 2009	SALDO AKHIR TAHUN 2009
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
	Piutang					
1.	Pajak Bahan Galian Golongan C	2009	Rp 495,887,500.00	Rp -	Rp 495,856,000.00	Rp 31,500.00
	Piutang Lain-lain					
2.	Pajak Penerangan Jalan Umum	2009	Rp 1,255,751,857.00	Rp -	Rp 1,255,751,857.00	Rp -
3.	Retribusi Sewa Kios Pasar	2009	Rp 1,680,870.00	Rp -	Rp 1,680,870.00	Rp -
4.	Retribusi lainnya/ pelayanan kesehatan DKKS	2009	Rp 35,005,966.00	Rp -	Rp 35,005,966.00	Rp -
5.	Piutang Lainnya Sumbangan Pihak Ketiga					
	PT Tirta Investama	2009	Rp 345,919,420.00	Rp 382,880,520.00	Rp 345,919,420.00	Rp 382,880,520.00
	PDAM Surakarta	2009	Rp 673,082,784.00	Rp -	Rp 673,082,784.00	Rp -
6.	Piutang Deviden Perusda Aneka Usaha	2009	Rp 34,702,292.00	Rp -	Rp -	Rp 34,702,292.00
	J U M L A H		Rp 2,346,143,189.00	Rp 382,880,520.00	Rp 2,311,440,897.00	Rp 417,582,812.00

Klaten, 3 September 2010

BUPATI KLATEN,

S U N A R N A

KABUPATEN KLATEN
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

NAMA BADAN/LEMBAGA/ PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	BENTUK PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	JUMLAH PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU (2008)	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI (2009)	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI (2009)	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN INI (2009)	JUMLAH MODAL (INVESTASI) YANG AKAN DISERTAKAN KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH SISA MODAL (INVESTASI) YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI (2009)
3 PD. BPR Bank Pasar	4 Perda Kabupaten Klaten No. 13 Tahun 2006 tanggal 14 Nopember 2006	5 Saham	6 Rp10.000.000.000.00	7 Rp 9.942.682.816.79	8 -	9 = 7 + 8 Rp 9.942.682.816.79	10 = 6 - 9 Rp 57.317.183.21	11 Rp 1.069.136.550.00	12 -	13 = 9 - 12 Rp 9.942.682.816.79
P D A M	tentang Penyerahan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Perusahaan Daerah	Saham	Rp10.000.000.000.00	Rp 6.335.281.682.00	Rp 6.635.745.000	Rp 12.971.026.682.00	Rp (2.971.026.682.00)	Rp 650.540.000.00	-	Rp 12.971.026.682.00
PD. BPR BKK-BKK	Koreksi BPK 2008	Saham	Rp12.200.000.000.00	Rp 4.777.821.327.00	-	Rp 4.777.821.327.00	Rp 7.422.178.673.00	Rp 406.430.494.00	-	Rp 4.777.821.327.00
Bank Jateng	Koreksi BPK 2007 & Koreksi BPK 2008	Saham	Rp 366.028.009.00	Rp 34.000.000.00	-	Rp 34.000.000.00	Rp 332.028.009.00	-	-	Rp 34.000.000.00
Perusda Aneka Usaha		Resipis Saham	Rp 5.000.000.000.00	Rp 3.835.928.685.00	-	Rp 3.835.928.685.00	Rp 1.164.071.315.00	Rp	-	Rp 3.835.928.685.00
PT Pusat Rekreasi				Rp 300.000.000.00		Rp 300.000.000.00				
Promosi Pemba ngunan (PRPP)				Rp 135.000.000.00	-	Rp 135.000.000.00	-	Rp	-	
PT Solo Raya Promosi										
SUBSUKOWONOSRATEN										
J U M L A H			Rp 37.566,028,009.00	Rp 32.230,714,510.79	Rp 6,794,745,000.00	Rp 39,025,459,510.79	Rp 6,004,568,498.21	Rp 4,101,047,114.00	Rp -	Rp 31,561,459,510.79

Penyerahan Modal Kepada PDAM berupa Penyerahan Instalasi Air Bersih Dari DPU yang dibangun Tahun Anggaran 2008 dan 2009 yang telah diikuti Modal dalam Laporan Kinerja BUMD PDAM TA 2009 tetapi belum diterbitkan resipis dari Bagian Perencanaan Seida Kabupaten Klaten

Klaten, 3 September 2010

BUPATI KLATEN,

SUNARNA

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

Lampiran I.7 : Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
 Nomor : 5 Tahun 2010
 Tanggal : 3 September 2010

No.	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	TANAH				
1.3.1.01	Tanah Kantor	781,794,161,730.00	-	-	781,794,161,730.00
1.3.1.07	Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum & Kejuruan	1,925,987,000.00	-	-	1,925,987,000.00
1.3.1.08	Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan & Kejuruan	1,942,473,000.00	-	-	1,942,473,000.00
1.3.1.18	Tanah Sarana Umum Pasar	0.00	-	-	-
1.3.1.20	Tanah Sarana Umum Taman	0.00	-	-	-
1.3.1.24	Tanah Perumahan	0.00	-	-	-
1.3.1.25	Tanah Pertanian	0.00	-	-	-
1.3.1.27	Tanah Perikanan	0.00	-	-	-
	JML TANAH	785,662,621,730.00	-	-	785,662,621,730.00
2	PERALATAN DAN MESIN				
1.3.2.01	Alat-alat Besar	95,550,612,450.00	-	-	95,550,612,450.00
1.3.2.02	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	69,350,273,197.00	1,475,210,013.00	-	70,825,483,210.00
1.3.2.03	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	255,270,000.00	-	-	255,270,000.00
1.3.2.04	Alat-alat Angkutan Air Bermotor	13,600,000.00	-	-	13,600,000.00
1.3.2.05	Alat-alat Angkutan Air Tidak Bermotor	43,700,000.00	-	-	43,700,000.00
1.3.2.07	Alat-alat Bengkel	6,908,005,900.00	763,175,000.00	-	7,671,180,900.00
1.3.2.08	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan peternakan	1,553,918,051.00	44,760,000.00	44,760,000.00	1,553,918,051.00
1.3.2.09	Peralatan Kantor	89,378,886,034.00	102,050,695.00	-	89,480,936,729.00
1.3.2.10	Pertengkapan Kantor	1,052,864,601.00	848,090,155.00	-	1,900,954,756.00
1.3.2.11	Komputer	7,795,028,494.00	1,835,232,573.00	23,870,000.00	9,606,391,067.00
1.3.2.12	Meubelair	2,972,673,362.00	9,458,885,893.00	-	12,431,559,255.00
1.3.2.13	Peralatan Dapur	145,524,359.00	22,320,589.00	-	167,844,948.00
1.3.2.14	Penghias Ruangan Rumah Tangga	277,870,612.00	121,670,063.00	58,050,000.00	341,490,675.00
1.3.2.15	Alat-alat Studio	3,945,763,941.00	954,791,737.00	-	4,900,555,678.00
1.3.2.16	Alat-alat Komunikasi	2,684,486,514.00	99,507,561.00	4,501,000.00	2,779,493,075.00
1.3.2.17	Alat-alat Ukur	4,900,603.00	-	-	4,900,603.00
1.3.2.18	Alat-alat Kedokteran	6,835,270,254.00	2,294,676,755.00	-	9,129,947,009.00
1.3.2.19	Alat-alat Laboratorium	30,748,590,190.00	2,060,636,223.23	-	32,809,226,413.23
1.3.2.20	Alat-alat Pensejajaran/Keamanan	2,745,193,200.00	193,961,000.00	-	2,939,154,200.00
	JML PERALATAN DAN MESIN	322,262,431,762.00	20,274,968,257.23	131,181,000.00	342,406,219,019.23

URAIAN		SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
2		3	4	5	6=3+4-5
3	GEDUNG DAN BANGUNAN				
1.3.3.01	Gedung Kantor	2,716,947,416,843.00	55,567,354,008.00	7,488,305,672.00	2,765,026,465,179.00
1.3.3.02	Gedung Rumah Jabatan	43,820,000.00	-	-	43,820,000.00
1.3.3.03	Gedung Rumah Dinas	228,092,000.00	26,938,600.00	-	255,030,600.00
1.3.3.04	Gedung Gudang	668,243,516.00	96,509,380.00	91,535,000.00	673,217,896.00
1.3.3.06	Bangunan Monumen	1,065,030,000.00	-	-	1,065,030,000.00
1.3.3.07	Tugu Peirngatan	1,361,396,600.00	-	-	1,361,396,600.00
1.3.3.08	Konstruksi papan reklame/billboard/palino/pengumuman/bando	121,585,000.00	216,331,400.00	34,250,000.00	303,666,400.00
1.3.3.09	Konstruksi/pembelian bangunan obyek wisata	507,342,900.00	-	-	507,342,900.00
1.3.3.10	Konstruksi/pembelian bangunan pasar/kios/los/ruko	6,549,463,000.00	8,648,311,000.00	-	15,197,774,000.00
1.3.3.11	Konstruksi/pembelian bangunan pasar/kios/los/ruko	2,034,962,500.00	4,279,631,000.00	-	6,314,593,500.00
1.3.3.12	Penataan Lingkungan/ bangunan taman	648,986,820.00	234,097,952.00	62,020,000.00	800,164,772.00
1.3.3.13	Konstruksi/pembelian bangunan gedung/tempat olah raga	74,144,140.00	-	-	74,144,140.00
1.3.3.14	Konstruksi/pembelian bangunan TPS/TPA sampah	193,104,300.00	597,821,840.00	382,295,965.00	193,104,300.00
1.3.3.15	Konstruksi/pembelian bangunan Laboratorium	2,730,369,443,479.00	69,741,139,320.00	8,079,306,637.00	2,792,031,276,162.00
4	JALAN,IRIGASI, DAN JARINGAN				
1.3.4.01	Jalan	176,885,803,345.00	18,394,006,276.00	255,504,735.00	195,024,304,886.00
1.3.4.02	Jembatan	3,535,931,999.00	4,540,002,358.00	-	8,075,934,357.00
1.3.4.03	Jaringan Air	1,079,589,784,695.00	8,484,582,451.00	9,787,692,451.00	1,078,286,674,695.00
1.3.4.04	Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota	632,052,800.00	12,033,004.00	-	644,085,804.00
1.3.4.05	Instalasi Listrik dan Telepon	4,063,791,378.00	24,308,499.00	-	4,088,099,877.00
	JM JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	1,264,707,364,217.00	31,454,932,588.00	10,043,197,186.00	1,286,119,099,619.00
5	ASET TETAP LAINNYA				
1.3.5.01	Buku dan Kepustakaan	25,781,775,206.00	1,652,690,221.75	3,164,192.00	27,431,301,235.75
1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	258,517,600.00	65,224,950.00	-	323,742,550.00
1.3.5.03	Hewan, Temak dan Tanaman	5,490,149,000.00	-	-	5,490,149,000.00
1.3.5.04	Software	62,219,145.00	-	-	62,219,145.00
	JML ASET TETAP LAINNYA	31,592,660,951.00	1,717,915,171.75	3,164,192.00	33,307,411,930.75
	TOTAL ASET TETAP	5,134,594,522,139.00	123,188,955,336.98	18,256,849,015.00	5,239,526,628,460.98

Klaten, 3 September 2010

BUPATI KLATEN,

SUNARNA

No.	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6=3+4-5
3	GEDUNG DAN BANGUNAN				
1.3.3.01	Gedung Kantor	2,716,947,416,843.00	55,567,354,008.00	7,488,305,672.00	2,765,026,465,179.00
1.3.3.02	Gedung Rumah Jabatan	43,820,000.00	-	-	43,820,000.00
1.3.3.03	Gedung Rumah Dinas	228,092,000.00	26,938,600.00	-	255,030,600.00
1.3.3.04	Gedung Gudang	668,243,516.00	96,509,380.00	91,535,000.00	673,217,896.00
1.3.3.06	Bangunan Monumen	1,065,030,000.00	-	-	1,065,030,000.00
1.3.3.07	Tugu Peringatan	1,361,396,600.00	-	-	1,361,396,600.00
1.3.3.08	Konstruksi papan reklame/billboard/balho/pengumuman/bando	121,585,000.00	216,331,400.00	34,250,000.00	303,666,400.00
1.3.3.09	Konstruksi/pembelian tempat ibadah	507,342,900.00	-	-	507,342,900.00
1.3.3.10	Konstruksi/pembelian bangunan obyek wisata	6,549,463,000.00	8,648,311,000.00	-	15,197,774,000.00
1.3.3.11	Konstruksi/pembelian bangunan pasar/kios/ios/ruko	2,034,962,500.00	4,279,631,000.00	-	6,314,593,500.00
1.3.3.12	Penataan Lingkungan/ bangunan taman	648,986,820.00	234,097,952.00	82,920,000.00	800,164,772.00
1.3.3.13	Konstruksi/pembelian bangunan gedung/tempat olah raga		74,144,140.00	-	74,144,140.00
1.3.3.14	Konstruksi/pembelian bangunan TPS/TPA sampah	193,104,300.00	597,821,840.00	382,295,965.00	215,525,875.00
1.3.3.15	Konstruksi/pembelian bangunan Laboratorium				
	JML GEDUNG DAN BANGUNAN	2,730,369,443,479.00	69,741,139,320.00	8,079,306,637.00	2,792,031,276,162.00
4	JALAN,IRIGASI, DAN JARINGAN				
1.3.4.01	Jalan	176,885,803,345.00	18,394,006,276.00	255,504,735.00	195,024,304,886.00
1.3.4.02	Jembatan	3,535,931,999.00	4,540,002,358.00	-	8,075,934,357.00
1.3.4.03	Jaringan Air	1,079,589,784,695.00	8,484,582,451.00	9,787,692,451.00	1,078,286,674,695.00
1.3.4.04	Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota	632,052,800.00	12,033,004.00	-	644,085,804.00
1.3.4.05	Instalasi Listrik dan Telepon	4,063,791,378.00	24,308,499.00	-	4,088,099,877.00
	JM JALAN, IIRIGASI, DAN JARINGAN	1,264,707,364,217.00	31,454,932,588.00	10,043,197,186.00	1,286,119,099,619.00
5	ASET TETAP LAINNYA				
1.3.5.01	Buku dan Kepustakaan	25,781,775,206.00	1,652,690,221.75	3,164,192.00	27,431,301,235.75
1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	258,517,600.00	65,224,950.00	-	323,742,550.00
1.3.5.03	Hewan, Ternak dan Tanaman	5,490,149,000.00	-	-	5,490,149,000.00
1.3.5.04	Software	62,219,145.00	-	-	62,219,145.00
	JML ASET TETAP LAINNYA	31,592,660,951.00	1,717,915,171.75	3,164,192.00	33,307,411,930.75
	TOTAL ASET TETAP	5,134,594,522,139.00	123,188,955,336.98	18,256,849,015.00	5,239,526,628,460.98

Klaten, 3 September 2010
BUPATI KLATEN,

SUNARNA

Lampiran I.8 : Peraturan Daerah Kabupaten Klaten

Nomor : 5 Tahun 2010

Tanggal : 3 September 2010

KABUPATEN KLATEN
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2009

NO	JENIS ASET TETAP DAERAH	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	Rp 1,845,025,170	-	Rp 1,845,025,170
2	Built Operate and Transfer (BOT)	Rp 68,856,052,074	Rp -	-	Rp 68,856,052,074
3	Perangkat Lunak Komputer	Rp 279,154,100	Rp 88,829,545	-	Rp 367,983,645
4	Website	Rp 49,750,000	Rp 8,095,455	-	Rp 57,845,455
	JUMLAH	Rp 69,184,956,174	Rp 1,941,950,170	-	Rp 71,126,906,344

Klaten, 3 September 2010
BUPATI KLATEN,

SUNARNA

Lampiran I.9 : Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
 Nomor : 5 Tahun 2010
 Tanggal : 3 September 2010

KABUPATEN KLATEN
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN 2009

NO.	NAMA SKPD	JUDUL KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	JUMLAH REALISASI				JUMLAH REALISASI s / d AKHIR TA. 2009 (Rp)	JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARKAN DALAM TA. 2010	
				APBD TA.2007	APBD TA.2008	APBD TA. 2009	PERUBAHAN APBD TA. 2009		APBD 2010	PERUBAHAN APBD 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	Jumlah			-	-	-	-	-	-	-

Klaten, 3 September 2010

BUPATI KLATEN,

SUNARNA